BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kredit sebagai tambahan modal bagi pelaku usaha, memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Kredit berasal dari bahasa Yunani "*Credere*" yang berarti kepercayaan. Pengertian kredit berkembang menjadi, kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati. Menurut Undang – undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Salah satu target penyaluran kredit yang bertujuan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah pemberian kredit pada UMKM. Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, disebutkan pada point I tentang Peningkatan Akses UMKM pada Sumber Pembiayaan. Salah satu kebijakan pada kebijakan yang ada pada poin ini adalah "Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akses UMKM pada sumber pembiayaan".

Pada kebijakan tersebut, pemerintah merencanakan sebuah program yang bermanfaat bagi UMKM yaitu pengembangan skema kredit investasi bagi UMKM. Dengan berjalannya program tersebut, diharapkan akan mampu mencapai beberapa sasaran yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh UMKM. Beberapa sasaran tersebut antara lain adalah:

1. Tersedianya skema pembiayaan investasi melalui kredit program bagi UMKM.
2. Tersedianya sumber dana untuk kredit investasi UMKM.
3. Kredit investasi UMKM tersalurkan secara efektif.

Sektor UMKM dipilih oleh Pemerintah sebagai sektor yang perlu mendapat perhatian lebih karena menurut beberapa ahli dan pengamat ekonomi menyebutkan bahwa UMKM merupakan kekuatan dari perekonomian Indonesia. Meskipun dampak UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi tidak terlalu tinggi, namun penyebaran efek yang dirasakan di masyarakat sangat luas. Salah satu efek dari penguatan UMKM tersebut adalah terciptanya lapangan pekerjaan yang cukup besar, dan mampu mengurangi angka pengangguran. Studi empiris membuktikan bahwa UMKM memiliki peranan penting dalam menyelamatkan kondisi perekonomian di masa krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998. Adanya UMKM mampu menyelamatkan beberapa tenaga kerja sehingga tidak sampai menganggur.

Perkembangan jumlah UMKM di Indonesia tumbuh sangat pesat. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, jumlah UMKM di Indonesia sampai dengan tahun 2021 mencapai angka 56.534.592 unit usaha. Angka tersebut mengalami pertumbuhan sebesar

1.328.147 unit dari tahun sebelumnya. Jumlah unit usaha mikro, kecil, dan menengah pada tahun 2021 tersebut memiliki proporsi 99,99% dari total unit usaha UMKM dan usaha Besar. UMKM di Indonesia masih sarat dengan kelemahan yang menyebabkan mereka sulit untuk mengembangkan usahanya. Beberapa kelemahan yang ada pada UMKM tersebut antara lain adalah kelemahan dalam akses modal, akses teknologi, akses pasar, manajemen keuangan serta sumber daya manuusia.

Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam upaya memberdayakan UMKM di Indonesia agar lebih memiliki daya saing dalam perekonomian Indonesia. Setiawan (2017:21) menyebutkan ada tiga peran penting Pemerintah dalam upaya pemberdayaan tersebut yaitu:

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi secara aktif.
2. Menciptakan iklim usaha yang kondusif.
3. Membuka akses terhadap sumber dinamika pertumbuhan internal UMKM itu sendiri, seperti pembiayaan dan kredit, akses pasar, teknologi, dan perbaikan manajemen.

Upaya Pemerintah dalam pemberdayaan UMKM adalah dengan diluncurkannya salah satu Program Pemerintah dalam Pembiayaan UMKM yang diberi nama Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit Usaha Rakyat merupakan salah satu solusi yang ditawarkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah permodalan yang sering dihadapi oleh UMKM. Kredit Usaha Rakyat (KUR) diluncurkan oleh Presiden pada tanggal 5 November 2007 dengan jaminan kredit dari pemerintah melalui PT Askrindo dan Perum Jamkrindo. Tujuan Pemerintah

meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat adalah untuk meningkatkan sektor riil dan memberdayakan UMKM.

Dalam pelaksanaannya program Kredit Usaha Rakyat yang memiliki tujuan untuk memberdayakan UMKM ini menemui berbagai kendala. Kendala yang sering muncul adalah adanya persepsi yang kurang baik di masyarakat tentang KUR. Menurut Bank Indonesia dalam "Serba-serbi Kredit Usaha Rakyat", menyebutkan bahwa ada beberapa kendala yang umum dihadapi dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat antara lain adalah:

1. Adanya persepsi bahwa KUR merupakan kredit yang dijamin sepenuhnya dan bantuan dari pemerintah. Maka muncul moral hazard di masyarakat debitur yang kurang memikirkan kewajiban pengembalian yang menimbulkan adanya kredit macet.
2. Masyarakat beranggapan bahwa penyaluran KUR tanpa agunan selalu sebesar 5-juta rupiah. Namun sebenarnya besarnya penyaluran KUR sesuai dengan penilaian Bank terhadap kemampuan usaha dari calon debitur, agar debitur tidak terbebani dalam pengembalian.
3. Banyak calon debitur (UMKM) yang sudah pernah atau sedang menikmati kredit/pembiayaan dari perbankan.
4. Banyak calon debitur yang tidak dapat memenuhi persyaratan dari Bank seperti identitas diri yang tidak cukup maupun kondisi usaha yang belum layak untuk mendapatkan kredit.
5. Beberapa Bank yang kantornya hanya terdapat di kota, penyaluran KUR terkendala karena keterbatasan untuk menjangkau lokasi calon

debitur yang relatif jauh. Kendala penyaluran KUR point pertama merupakan kendala yang berpotensi mengakibatkan munculnya kredit macet pada program Kredit Usaha Rakyat yang cukup tinggi.

Hal ini dapat dilihat dari tingginya *Non Performing Loan* (NPL) Kredit UMKM pada data yang ditunjukkan oleh Bank Indonesia. *Non Performing Loan* (NPL) adalah salah satu indikator untuk menilai kinerja bank, karena apabila NPL tinggi menunjukkan indikator gagalnya sebuah Bank dalam mengelola bisnis. Indikator gagalnya sebuah bank tersebut antara timbul masalah Likuiditas (ketidakmampuan membayar pihak ketiga), Rentabilitas (utang tidak bisa ditagih), serta Solvabilitas (modal berkurang). Kredit UMKM menjadi penyumbang NPL terbesar apabila dibandingkan dengan kredit non-UMKM. Besarnya NPL kredit non-UMKM sampai Oktober 2021 adalah mencapai 36.770 Milliar Rupiah atau 1,58% dan Nilai NPL kredit UMKM adalah 21.631 Milliar Rupiah atau sebesar 3,8%. Besarnya NPL pada kredit perbankan sebesar 58.401 Milliar Rupiah atau sebesar 2,01%. NPL kredit UMKM menjadi yang paling besar dibandingkan dengan kredit – kredit lainnya.

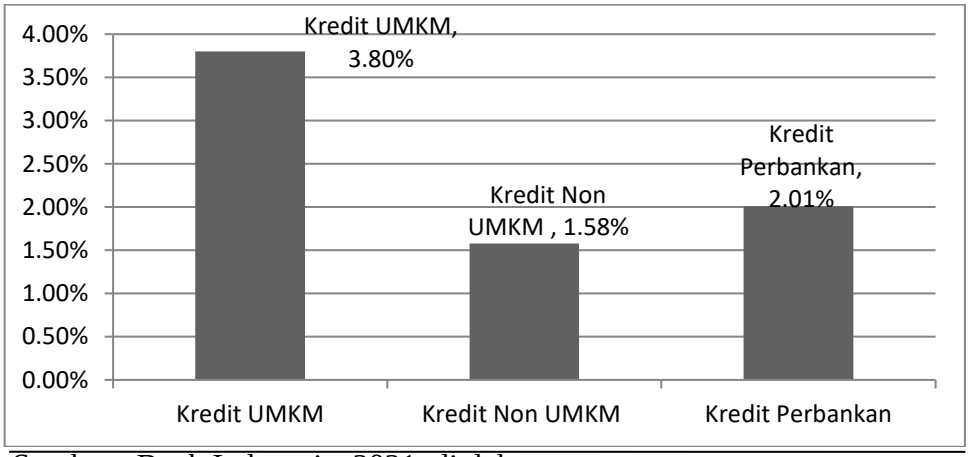

Sumber : Bank Indonesia, 2021, diolah.

Gambar.1.1 Tingkat NPL Kredit pada Bank Indonesia Oktober 2021

Tingginya kredit macet yang terjadi pada penyaluran KUR menunjukkan bahwa program KUR ini belum bisa berjalan seperti yang diharapkan Pemerintah. Tingginya kredit macet pada penyaluran program KUR ini dapat dilihat dari besarnya NPL pada Kredit KUR dari masing-masing Bank Pelaksana

Permasalahan pengembalian pembiayaan yang tidak lancar menjadi persoalan yang perlu dipecahkan karena pihak manajemen memiliki harapan dan target untuk menekan bahkan menghilangkan permasalahan tersebut. Beberapa faktor yang diduga menghambat tingkat pengembelian kredit adalah karateristik peminjam dan lama usaha. Karateristik peminjam merupakan karakter individu yang mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Karakter atau watak merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan kredit/pembiayaan. Bank sebagai pemberi kredit/pembiayaan harus yakin bahwa calon nasabah pembiayaan bertingkah laku baik, dalam arti harus berpegang teguh pada janjinya. Selalu berusaha dan bersedia melunasi utang-utangnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sehingga apabila calon nasabah berkarakter baik, maka kemungkinan terjadinya ketidaklancaran dalam pengembalian pembiayaan tidak terjadi dan sebaliknya apabila calon nasabah berkarakter kurang baik, maka kemungkinan terjadi ketidaklancaran mungkin akan terjadi

Karakter merupakan ukuran untuk menilai kemauan nasabah membayar kredit/pembiayaannya. Orang yang baik memiliki karakter baik kan berusaha untuk membayar kreditnya/pembiayaannya dengan berbagai cara. Hal ini terkait dengan kemauan dan kesungguhan membayar angsuran pembiayaan yang tentunya sangat berpengaruh terhadap integritas dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan dan pemanfaatan pemberian pembiayaan.

Selain faktor tersebut masih terdapat satu faktor yang diduga mempengaruhi tingkat pengembalian kredit yaitu lama usaha. Lama usaha adalah lama waktu yang sudah dijalani pedagang dalam menjalankan usahanya. Dalam menjalankan usaha lama usaha dapat memiliki pengaruh yang besar pada keberhasilan usaha tersebut mengembalikan besarnya pinjaman kredit. Dimana semakin lama usah itu berdiri maka semakin terampil pengelola dan semakin mengetahui seluk beluk usahanya tersebut. Dan dari lama usaha orang menjadikan kegagalan dan jalan perinitsan usahanya sebgai bekal guna memajukan dan melancarkan uasahanya tersebut. Banyaknya pengalaman seseorang akan memperluas wawasanya tentang usahanya tersebut. Dengan demikian pula akan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan orang itu sendiri, makin lama dan intensif usaha itu berdiri maka semakin besar pula pendapatan yang diterima oleh orang itu sendiri. Dalam pengajuan kredit pada suatu lembaga keuangan, lama usaha berdir juga mnjadi faktor penentu tingkat keberhasilan kredit itu sendiri. Artinya semakin lama suatu usaha tersebut berlangsung maka semakin kredibel usaha itu dibandingkan dengan usaha yang baru.

Lama usaha seseorang dalam menjalankan kegiatan usahanya juga mempengaruhi pendapatan yang diterima. Meskipun telah memiliki modal yang cukup untuk menjalankan usaha tanpa adanya pengalaman maka peluang pengusaha untuk mengembangkan usaha tersebut sangatlah kecil, karna semakin lama usaha tersebut dijalankan maka kemampuan dalam menjalankan usaha semakin meningkat berdasarkan pengalaman yang diperoleh. Para pengusaha industri kecil dapat melakukan ekspansi atau pengembangan usahanya dalam bentuk dan bidang yang lebih luas sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan

dapat mengembalikan pinjaman (Efrianto dkk 2017: 1). Diharapkan semakin lama suatu usaha didirikan maka keterampilan yang dimiliki semakin baik sehingga dapat meningkatkan pendapatan para pedagang dan dapat mengembalikan pinjaman.

Bank BRI hadir sebagai bank yang memberikan solusi termudah bagi nasabah yang ingin menabung maupun melakukan pinjaman dengan memberikan pelayanan yang bermutu. Dengan biaya administrasi yang kecil dan tingkat suku bunga yang bersaing membuat masyarakat dapat menjatuhkan pilihan di bank BRI. Sesuai dengan misi Bank BRI yaitu melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat, memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan melaksanakan praktek good corporate governance sehingga Bank BRI merupakan alternatif yang memadai untuk para nasabah.

Sebagai salah satu bank BUMN, Bank Rakyat Indonesia dapat menerapkan sistem data *mining* untuk menganalisis pola nasabah berdasarkan tingkat kecenderungan. Hasil analisis ini dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam menemukan pola asosiasi nasabah kredit usaha rakyat yang dapat di gunakan oleh pihak menejemen BRI untuk lebih mempermudah menganalisa nasabah yang akan mengajukan pinjaman KUR dengan pertimbangan data nasabah yang telah terealiasasi sebelumnya, dengan menggunakan analisis sistem data *mining*, manajemen bank rakyat Indonesia

dapat mendimulasikan berbagai kondisi keputusan dengan justifikasi data yang telah ditentukan.

Bank Rakyat Indonesia menjadi Bank pelaksana dengan jumlah nasabah paling besar apabila dibandingkan dengan Bank Pelaksana yang lain. Namun besarnya jumlah nasabah tersebut juga dibarengi dengan tingginya angka outstanding kredit di Bank Rakyat Indonesia. Angka *outstanding* tersebut bisa dilihat dari nilai NPL Bank Rakyat Indonesia dikalikan dengan jumlah nasabah yang menjadi debitur KUR Bank Rakyat Indonesia. Penyaluran KUR yang telah berjalan 14 tahun mampu menjangkau para pelaku UMKM yang berada di seluruh Provinsi di Indonesia, meskipun besarnya penyaluran dari masing–masing provinsi tidak sama. Untuk menjaga kelancaran dan berhasilnya program KUR dari adanya kredit yang tidak lancar, maka perlu dilakukan analisis untuk mengetahui faktor – faktor yang diduga dapat mempengaruhi tingkat kelancaran pengembalian KUR. Berikut ini dapat dilihat tabel tingkat NPL dari masing - masing Bank Pelaksana KUR hingga bulan Maret 2022.

Tabel 1.1 Realisasi KUR pada Bank Pelaksana

No	Bank	Realisasi Penyaluran KUR			NPL
		Plafon (Rp Juta)	Debitur	Rata-rata Kredit (Rp Juta/debitur)	
1.	BNI	13,339,468	208,959	63,8	10,3
2.	BRI (KUR Ritel)	13,604,866	83,471	163	3,5
3.	BRI (KUR Makro)	51,743,392	7,537,785	6,9	2
4.	Bank Mandiri	11,162,396	221,967	50,3	2,8
5.	BTN	3,539,330	20,442	173,1	6,7
6.	Bukopin	1,680,210	11,241	149,5	4,8
7.	Bank Syariah Mandiri	3,070,293	40,944	75	6,2
8.	BNI Syariah	58,751	241	243,8	1
9.	BPD	10,223,672	129,687	78,8	7,3
	Total	108,422,378	8,254,737	13,1	4,4

Sumber : Komite-KUR 2022, diolah

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa Bank Rakyat Indonesia merupakan Bank Pelaksana yang memiliki peranan paling besar dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat kepada Koperasi dan UMKM. Hal tersebut dapat dilihat dari plafon BRI (KUR Ritel + KUR Mikro) mencapai 65,3 Triliun rupiah dengan rincian 13,6 Triliun rupiah pada KUR Ritel, dan 51,7 Triliun rupiah pada KUR Mikro. Dilihat dari besarnya nasabah, Bank Rakyat Indonesia mampu menjangkau jumlah debitur terbesar yaitu mampu menyalurkan Kredit Usaha Rakyat kepada 7.621.256 debitur di seluruh Indonesia.

Peneliti memilih bank BRI karena telah memiliki nama besar dan telah memiliki nasabah paling tinggi dan jumlah cabang terbesar di antara seluruh bank yang ada di Indonesia yakni berjumlah 52 juta nasabah aktif sedangkan nasabah bank-bank lain masih di bawah 25 juta (http://krjogja.com/ bri-miliki52-juta-nasabah-aktif.kr). Selain itu pada tahun 2014, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BRI) berhasil mempertahankan posisinya sebagai peraih laba terbesar. Bank BRI kredit UKM dan mikro ini, sepanjang Juli-AgustusSeptember 2014 meraup laba bersih Rp 18,12 triliun. Raihan ini naik 18,97 persen dibandingkan laba bersih periode yang sama tahun 2013 yakni sebesar Rp 15,23 triliun (http://www.harianterbit.com/, 2014). Tingginya jumlah nasabah dan laba tak lepas dari berbagai bentuk kegiatan promosi yang telah dilakukan oleh bank BRI. Berbagai bentuk promosi seperti event, sponsorship, dan berbagai layanan ekstra yang ditawarkan langsung kepada pelanggan membuat masyarakat lebih mengenal bank BRI.

Bank Rakyat Indonesia menjadi Bank pelaksana dengan jumlah nasabah paling besar apabila dibandingkan dengan Bank Pelaksana yang lain. Namun besarnya jumlah nasabah tersebut juga dibarengi dengan tingginya angka outstanding kredit di Bank Rakyat Indonesia. Angka *outstanding* tersebut bisa

dilihat dari nilai NPL Bank Rakyat Indonesia dikalikan dengan jumlah nasabah yang menjadi debitur KUR Bank Rakyat Indonesia. Penyaluran KUR yang telah berjalan 6 tahun mampu menjangkau para pelaku UMKM yang berada di seluruh Provinsi di Indonesia, meskipun besarnya penyaluran dari masing–masing provinsi tidak sama. Berikut data nasabah KUR Bank Rakyat Indonesia di Kantor Cabang Pasir Pengaraian.

Tabel 1.2 Data Realisasi KUR Mikro BRI Cabang Pasir Pengaraian 2021

No	Bulan	Data **Realisasi KUR Mikro**	
		Plafon (Jutaan)	Debitur
1.	Januari	RP. 10,424	913
2.	Februari	Rp. 10,494	913
3.	Maret	Rp. 10,891	955
4.	April	Rp. 11,352	973
5.	Mei	Rp. 11,883	993
6.	Juni	Rp. 11,990	1,008
7.	Juli	Rp. 12.189	1,029
8.	Agustus	Rp. 12,137	1,035
9.	September	Rp. 12,589	1,064
10.	Oktober	Rp. 13,174	1,106
11.	November	Rp.12,093	1,065
12	September	Rp. 11,103	1,034

Sumber : Data BRI Cabang Pasir Pengaraian 2021

Pada tabel 1.2 memperlihatkan data pertumbuhan jumlah realisasi KUR Mikro yang di dapat dari observasi dan wawancara salah satu pegawai kantor BRI Cabang Pasir Pengaraian. Data tersebut mengalami fluktuasi dengan jumlah penyaluran KUR mikro tertinggi mecapai 13 miliar lebih dengan jumlah debitur 1.106 orang. namun tingginya jumlah debitur menyebabkan resiko kredit bermasalah juga meningkat.

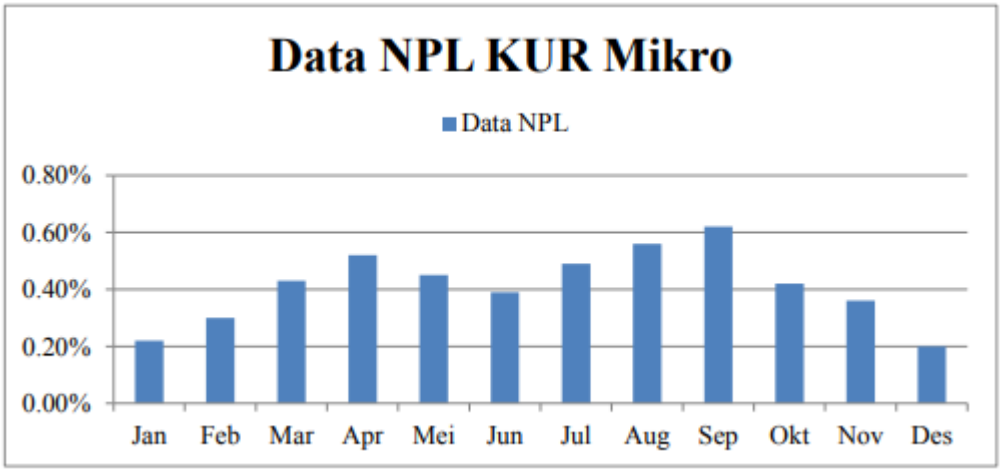

Sumber : Data BRI Cabang Pasir Pengaraian 2021 (Diolah)

Gambar.1.2 NPL KUR Mikro BRI Cabang Pasir Pengaraian 2021

Gambar 1.2 memperlihatkan NPL KUR Mikro BRI unit Pasir Pengaraian mengalami fluktuatiasi. Namun di bulan desember NPL KUR Mikro mengalami penurunan yang sangat drastis jika di bandingkan bulan bulan sebelumnya itu menunjukkan keberhasilan BRI unit Kappuna dalam mengendalikan resiko terjadinya kredit bermasalah. Terlepas dari keberhasilan dalam mengendalikan NPL, bukan berarti hal tersebut tidak menjadi perhatian khusus oleh bank BRI Cabang Pasir Pengaraian dalam meminimalisir resiko akan terjadi peningkatan NPL.

Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di lapangan, maka peneliti melakukan prasurvei penelitian terhadap 10 UMKM dengan memberikan pertanyaan terkait variabel yang diteliti, adapun hasil prasurvei dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3
Hasil Prasurvei Penelitian

Pengukuran Variabel	Pernyataan	
	Ya	Tidak
Karakteristik peminjam (X1)		
1. Jumlah tanggungan keluarga	6	4
2. Jumlah pinjaman	8	2
3. Jangka waktu pengembalian pinjaman	7	3
Lama usaha (X2)		
1. Lama usaha pedagang dinyatakan dalam satuan tahun	4	6
2. Keterampilan usaha	7	3
3. Pengalaman usaha	7	3
4. Pengetahuan usaha	4	6

Sumber: Hasil Prasurvei Penelitian, 2022

Dari Tabel 1.3 dapat dijelaskan bahwa berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara terhadap 10 UMKM diperoleh hasil bahwa pada karakteristik peminjam sebanyak 6 UMKM menyatakan bahwa jumlah tanggungan keluarga mempengaruhi tingkat pengembalian kredit, 8 UMKM menyatakan bahwa jumlah pinjaman mempengaruhi tingkat pengembalian kredit dan 7 UMKM menyatakan bahwa jangka waktu pengembalian mempengaruhi tingkat pengembalian kredit. Pada variabel lama usaha sebanyak 4 UMKM menyatakan bahwa lama usaha mempengaruhi tingkat pengembalian kredit, 7 UMKM menyatakan bahwa keterampilan usaha dan pengalaman usaha mempengaruhi tingkat pengembalian kredit sert 4 UMKM menyatakan bahwa pengetahuan usaha mempengaruhi tingkat pengembalian kredit.

Bagi UMKM, banyak kendala yang dihadapi dalam pengembalian dana kredit yang diberikan oleh pihak bank BRI. Permasalahan karakteristik peminjam yang dihadapi pihak UMKM adalah dari sisi jumlah pinjaman. Besarnya jumlah pinjaman yang diperoleh belum bisa menopang semua biaya produksi usaha. Hal ini berdasar pengakuan pemilik UMKM, bahwa pinjaman yang diperoleh tidak

seutuhnya dimanfaatkan sebagai modal usaha, tetapi juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Jika dikaitkan dengan lama usaha, bagi UMKM baru dihadapi dengan ketatnya persaingan UMKM terutama dimasa pandemi saat ini, harga bahan baku yang mahal dan lemahnya daya beli masyarakat, membuat UMKM kesulitan dalam pengembalian kredit pada Bank. Apalagi bagi UMKM yang masih baru, tentunya sangat sulit bersaing untuk mendapatkan pelanggan, hal ini secara tidak langsung mempengaruhi pendapatan UMKM dan berdampak pada kemampuan UMKM mngembalikan kredit pinjaman.

Di Kecamatan Rambah sendiri perkembangan UMKM relatif berkembang pesat. Dimana perkembangan tersebut tersebar di sejumlah wilayah Kecamatan Rambah yang meliputi 1 kelurahan dan 13 desa hampir semua UMKM yang berada di bawah naungan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha, Kecil, Menengah (UKM) Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Dengan adanya Program Pemerintah dalam Pembiayaan UMKM yang diberi nama Kredit Usaha Rakyat (KUR) diharapkan usaha-usaha yang berada di Kecamatan Rambah bisa mengatasi masalah permodalan yang sering dihadapi oleh UMKM. Berikut ini adalah data jumlah UMKM di mengatasi masalah permodalan yang sering dihadapi oleh UMKM menurut Data Binaan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM di Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 1.4
Data UMKM di Kecamatan Rambah

Tahun	Jumlah Dalam Unit			Total
	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	
2016	69	58	45	172
2017	66	58	47	171
2018	68	66	50	184
2019	62	72	55	189
2020	65	85	64	214
2021	69	84	76	229

Sumber : Dinas Koperasi UKM, Tranmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu, 2022

Berdasarkan data pada Tabel 1.4, dapat dilihat bahwa jumlah UMKM secara keseluruhan di Kecamatan Rambah bedasarkan surat izin usaha perdagangan (SIUP) setiap tahunnya selalu berubah. Pada bidang usaha mikro terjadi penurunan jumlah unit surat izin usaha pada tahun 2016 ke tahun 2017 dari 69 unit menjadi 66 unit, hal ini disebabkan karena banyaknya pelaku usaha yang tidak melakukan pemanjangan SIUP ke badan penanaman modal daerah (BPMD), namun usaha mereka tetap berjalan. Pada bidang usaha kecil terjadi peningkatan jumlah unit SIUP setiap tahunnya dan tidak mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena semakin bertambahnya jumlah unit usaha serta surat izin usahanya. Pada bidang usaha menengah terjadi peningkatan jumlah unit SIUP dari tahun 2016 sampai tahun 2021. Hal ini disebabkan karena semakin bertambahnya jumlah unit usaha serta surat izin usahanya. Kecamatan Rambah merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, Riau, Indonesia. Rambah merupakan salah satu kecamatan yang memiliki perkembangan pusat bisnis yang tumbuh sangat pesat terutama di bidang UMKM. Hal ini yang membuat penulis tertarik dalam melakukan penelitian di Kecamatan Rambah. Kecamatan Rambah

memiliki 169 UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Rokan Hulu (Dinas Koperasi dan UMKM Rokan Hulu, 2022).

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena masalah yang terjadi pada UMKM di Kecmatan Rambah, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai perilaku konsumtif dengan judul penelitian“ Pengaruh Karakteristik Peminjam dan Lama Usaha Terhadap Tingkat Pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Pada Bank BRI Cabang Pasir Pengaraian”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan urian pada latar belakang untuk mempertegas permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh karakteristik peminjam dan lama usaha secara parsial terhadap tingkat pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Pada Bank BRI Cabang Pasir Pengaraian?
2. Bagaimana pengaruh karakteristik peminjam dan lama usaha secara simultan terhadap tingkat pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Pada Bank BRI Cabang Pasir Pengaraian?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan urian pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka dikemukakan tujuan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh karakteristik peminjam dan lama usaha secara parsial terhadap tingkat pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Pada Bank BRI Cabang Pasir Pengaraian.

2. Untuk mengetahui pengaruh karakteristik peminjam dan lama usaha secara simultan terhadap tingkat pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Pada Bank BRI Cabang Pasir Pengaraian.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu meberikan kontribusi berupa manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak Bank BRI

   Diharapkan dapat memberikan gambaran tentang keadaan KUR Mikro bagi pengambil kebijakan dalam memutuskan setiap pemberian kredit. Dengan mengetahui hasil pengaruh dari variabel independen, diharapkan pemberi keputusan kredit dapat menyalurkan kredit yang lebih efektif. Sehingga dapat meminimalkan kredit yang tidak lancar, maka bergulirnya kredit dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan tambahan modal.

2. Bagi Akademisi

   Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi akademisi yang ingin melakukan penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan informasi dan pengetahuan mengenai dunia perbankan.

3. Bagi Penulis

   Penelitian ini bermanfaat memberikan tambahan wawasan bagi penulis di bidang perbankan. Serta dapat menerapkan disiplin ilmu yang di dapat di perkuliahan, berpikir kritis dan sistematis, dan mampu mengaplikasikan teori.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

Pada bab ini disajikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan fakta dan kasus yang sedang dibahas, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka konseptual dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan metode penelitian yang berisi tentang objek penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional, tehnik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Merupakan penyajian data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, ditafsirkan, dikaitkan dengan kerangka teoritik.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai pada masing-masing bab sebelumnya, menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Karakteristik Peminjam

Peminjam/nasabah adalah pelanggan (*costumer*) yaitu individu atau perusahaan yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan, meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta layanan jasa (Sutisna, 2017:31). Peminjam/debitur menurut Pasal 1 ayat (17) UU No. 10 tahun 1998 adalah "orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Menurut Kasmir (2017:21) "debitur/peminjam adalah orang atau badan usaha yang memilki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang. Menurut Saladin (2018:112) debitur/peminja adalah pihak yang berhutang ke piha lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari pihak pemberi pinjaman (kreditur) untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang.".

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa karaktristik peminjam adalah penerima hutang yang diperoleh dari pemberi hutang yang pembayarannya ditentukan oleh jangka waktu pengembalian yang sudah disepakati sebelumnya.

2.1.1.1 Indikator Karakteritsik Peminjam

Menurut Sudrajad (2018:30-37), karakteristik peminjam memiliki 3 indikator, yaitu:

1. Jumlah tanggungan keluarga

   Jumlah tanggungan keluarga sangat berkaitan dengan beesarnay pengeluaran debitur.

2. Jumlah pinjaman

   Jumlah pinjaman yang semangkin besar diterima, maka akan memperbesar beban angsuran yang harus dibayar.

3. Jangka waktu pengembalian pinjaman

   Semakin lama jangka waktu peminjaman, maka angsuran bulanan relative ringan.

Menurut Scarborough dan Zimmerer (2018:14) mengemukakan delapan karakteristik wirausaha meliputi:

1. *Desire for responsibility,* yaitu memiliki rasa tanggung jawab atas usaha-usaha yang dilakukannya. Seorang yang memiliki rasa tanggung jawab akan selalu mawas diri.
2. *Preference for moderate risk,* yaitu lebih memilih risiko yang moderat, artinya ia selalu mengindari risiko yang rendah dan menghindari risiko yang tinggi.
3. *Confidence in their ability to success*, yaitu percaya akan kemampuan dirinya untuk berhasil.
4. *Desire for immediate feedback,* yaitu selalu menghendaki umpan balik yang segera.

5. *High level of energy*, yaitu memiliki semangat dan kerja keras untuk mewujudkan keinginanya demi masa depan yang lebih baik.
6. *Future orientation*, yaitu berorientasi ke masa depan, perspektif, dan berwawasan jauh ke depan.

2.1.2 Lama Usaha

Lama pembukaan usaha dapat mempengaruhi tingkat pendapatan, lainnya seorang pelaku usaha atau bisnis menekuni bidang usahanya akan mempengaruhi produktifitasnya (kemampuan/keahliannya), sehingga dapat menambah efisiensi dan mampu menekan biaya produksi lebih kecil dari pada hasil penjalan. Semakin lama menekuni bidang usaha perdagangan akan semakin meningkatkan pengetahuan tentang selera ataupun prilaku konsumen. Keterampilan berdagang makin bertambah dan semakin banyak pula relasi bisnis maupun pelanggan yang berhasil dijaring. Keahlian kausahawaan merupakan kemampuan yang dimiliki seorang untuk mengorganisasikan dan menggunakan faktor-faktor lain dalam kegiatan memproduksi barang dan jasa yang diperlukan masyarakat (Priyandika, 2015:21).

Lamanya suatu usaha dapat menimbulkan pengalaman berusaha, dimana pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan seseorang dalam bertingkah laku. Lama pembukaan usaha dapat mempengaruhi tingkat pendapatan, lama seorang pelaku bisnis menekuni bidang usahanya akan mempengaruhi produktivitasnya (kemampuan prefesionalnya/keahliannya), sehingga dapat menambah efisiensi dan mampu menekan biaya produksi lebih kecil dari pada hasil penjualan. Semakin lama menekuni bidang usaha perdagangan akan makin meningkatkan pengetahuan tentang selera ataupun perilaku konsumen (Timmons, 2017:41).

2.1.2.1 Indikator Lama Usaha

Saifudin (2017:3) menggambarkan faktor pendorong yang mendasari kesuksesan lamanya suatu usaha dapat bertahan melalui tiga faktor yaitu :

1. Peluang usaha

   Merupakan inti dari proses kewirausahaan. Suatu peluang usaha dianggap baik jika memiliki permintaan pasar, struktur pasar dan ukuran pasar yang baik, besarnya marjin. Ringkasnya, suatu peluang dikatakan memiliki kekuatan bila investor mendapatkan modalnya kembali.

2. Sumber daya

   Yakni potensi dan kompetensi yang didukung oleh kreativitas dan penghematan. Wirausahawan yang sukses adalah yang dapat menghemat modal dan memanfaatkannya dengan cerdik.

3. Tim

   Artinya dipimpin oleh wirausahawan yang sudah memiliki pengalaman kerja yang sukses. Menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat, menghargai yang berhasil tetapi juga membantu yang gagal. Menerapkan standar perilaku dan performa yang tinggi pada tim.

Penelitian ini mengguanakan variabel lama usaha dengan indikator yang diadopsi dari Danang (2017) yaitu:

1. Lamanya pengusaha atau pelaku usaha dalam menjalankan bisnis atau usahanya yang dinyatakan dalam satuan tahun.

2. Ketrampilan usaha, dalam memproduksi suatu produk tentunya baik dan cepat, dengan kreativitas dan pengalamannya juga mampu menghasilkan produk dengan inovasi yang baru.
3. Pengalaman usaha, semakin banyak pengalaman dalam melakukan usaha maka produk yang dihasilkan akan memiliki kualitas yang baik.
4. Pengetahuan usaha, semakin banyak ilmu yang didapat maka akan dengan mudah pemilik usaha mengetahui selera atau keinginan konsumen atau pelanggan.

2.1.3 Pengembalian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani "*Credere*" yang berarti kepercayaan, oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau semua badan yang memberikan kredit (*kreditur*) percaya bahwa penerima kredit (*debitu*r) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang atau jasa (Thomas dkk, 2018:12). Kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan (Taswan, 2017:163).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah sebagai berikut : "penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam

untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga". Menurut Muljono (2017:12) dalam bukunya berjudul "Manajemen perkreditan bagi Bank komersil" mendefinisikan bahwa kredit adalah "kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan pada suatu jangka waktu yang disepakati".

Dari beberapa pengertian tentang kredit yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan antara pihak bank dengan pihak peminjam dengan suatu janji bahwa pembayarannya akan dilunasi oleh pihak peminjam sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati beserta besarnya bunga yang telah ditetapkan.

2.1.3.1 Penggolongan Kredit Lancar

Demi amannya suatu kredit, maka perlu diambil langkah-langkah untuk mengklasifikasikan kredit berdasarkan kelancarannya. Hal ini sangat diperlukan untuk melakukan tugastugas pengendalian kredit agar dapat berjalan dengan lancar. Keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga pinjaman oleh nasabah, terlihat pada tata usaha bank dan hal ini merupakan kolektibilitas dari kredit. Kolektibilitas adalah suatu pembayaran pokok atau bunga pinjaman oleh nasabah sebagaimana terlihat tata usaha bank berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (BI) No. 32/268/KEP/DIR tanggal 27 Pebruari 1998, maka kredit dapat dibedakan menjadi :

1. Kredit lancar

   Kredit lancar yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit. Kredit lancar mempunyai kriteria sebagai berikut:

   1) Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu.
   2) Memiliki mutasi rekening yang aktif.
   3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan uang tunai.

2. Kredit kurang lancar

   Yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman atau pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 90 hari sampai 180 hari dari waktu yang telah disepakati. Kredit kurang lancar mempunyai kriteria sebagai berikut:

   1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari.
   2) Frekuensi mutasi rendah.
   3) Terjadi pelnggaran terhadap kontrak yang telah dijanjikan lebih dari 90 hari.
   4) Terjadi mutasi masalah keuangan yang dihadapi debitur. Dokumentasi pinjaman lemah.

3. Kredit diragukan

   Yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan yang telah melampaui 180 hari sampai 270 hari dari waktu yang disepakati. Kredit diragukan memiliki kriteria sebagai berikut:

1) Terdapat tunggakan angusran pokok atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
2) Terjadinya wanprestasi lebih dari 180 hari.
3) Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
4) Terjadi kapitalisasi bunga.
5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian maupun pengikat pinjaman.

4. Kredit macet

Yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 270 hari. Kredit macet mempunyai kriteria sebagai berikut :

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 270 hari.
2) Kerugian operasional dituntut dengan pinjaman baru.
3) Jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar, baik dari segi hukum maupun dari segi kondisi pasar.

2.1.3.2 Indikator Pengembalian Kredit

Menurut Thomas dkk (2018:12), indicator yang digunakan untuk mengukur kemampuan pembayaran kredit nasabah adalah:

1. Jumlah pinjaman
2. Tingkat bunga pinjaman
3. Skedul Pembayaran
4. Besarnya angsuran

2.1.4 Pengertian UMKM

Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2008 UMKM maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

Usaha Mikro merupakan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimilik perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro yang telah diatur didalam Undang-Undang. Dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualanan tahunan. Sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh UU No. 20 Tahun 2008.

Sedangkan Usaha Menengah merupakan usaha dalam ekonomi produktif yang bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan dan menjadi bagian secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan sesuai yang sudah diatur dengan Undang-Undang.

Definisi UMKM menurut Undang-Undang terbaru diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2021 tentang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. 1) Pasal 1 dari UU terebut, dinyatakan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangn yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatui dalam Peraturan Pemerintah ini. 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang ditakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usa-ha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam pe;att:ran pemerintah ini. 3)

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau rnenjadi bagian baik langsung maupun ticlak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini.

Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut:

a) Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.
b) Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.500.000, dan.
c) Usaha menengah adalah perusahaan dengan milai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan di atasRp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar.5

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga pemerintahan seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro,usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar.

Misalnya menurut Badan Puat Statistik (BPS), usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang, usaha kecil antara 5 sampai 19 pekerja, dan usaha menengah dari 20 sampai dengan 99 orang. Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk dalam kategori usaha besar.

Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas. Menurut Tambunan (2012:27), UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang samapai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang.

2.1.4.1 Kriteria UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor No.7 Tahun 2021 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:

a. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik`orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni:

1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,
2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

b. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni:

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria:

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta`rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2.1.5 Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan Komite-KUR adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UKM dan Koperasi yang feasible tapi belum bankable. Maksudnya adalah usaha yang memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan (KUR, 2010), sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008, KUR merupakan kredit pembiayaan kepada UKM dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.

KUR merupakan program dari pemerintah yang dibentuk untuk meningkatkan akses UKM terhadap sumber permodalan dari lembaga keuangan formal dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan. Program ini dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan bank. Tugas bank dalam program ini yaitu sebagai pihak yang menyediakan dana. Dapat disimpulkan bahwa program ini merupakan program pemerintah, namun sumber dana sepenuhnya berasal dari dana bank. Pelaksanaan penyaluran program KUR pemerintah menggandeng bank

dalam negeri untuk menyalurkan pada nasabah-nasabah yang memerlukan dana. Bank yang ditunjuk diantaranya, yaitu BRI, BNI, BTN, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, dan 13 BPD.

Kredit Usaha Rakyat ini difokuskan pada 5 sektor utama yaitu pertanian, perikanan dan kelautan, koperasi, kehutanan serta perindustrian, dan perdagangan. Dana yang disalurkan dalam program KUR sepenuhnya merupakan dana pihak ketiga (DPK) milik perbankan. Pemerintah hanya memberikan intensif dengan menjamin sebagian risiko kredit (70%-80%) melalui lembaga penjaminan. Perusahaan penjaminan milik pemerintah, yaitu Jamkrindo, Askrindo, Jamkrida Jatim, dan Jamkrida Bali. Perusahaan-perusahaan ini berperan sebagai lembaga penjaminan KUR. Mekanisme dan ketentuan penyaluran KUR ditentukan oleh bank pelaksana dengan prinsip kredit komersial.

Mekanisme Penyaluran KUR Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.05/2009 tentang Fasilitas Penjamin Kredit Usaha Rakyat, terdapat beberapa ketentuan yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penyaluran KUR, yaitu UKM-K yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang layak namun belum bankable dengan beberapa ketentuan yaitu merupakan debitur baru yang belum pernah mendapat kredit dari perbankan. Fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitur yang belum pernah mendapat kredit dari program lain. Kesepakatan KUR diperjanjikan oleh Bank Pelaksana dengan UKM-K.

KUR terbagi menjadi dua yakni KUR Retail dan KUR Mikro. Plafond yang ditetapkan untuk KUR Retail sebesar Rp 25.000.000 sampai Rp 500.000.000, dengan tingkat suku bunga sebesar maksimal 14 persen efektif per tahun atau ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan. Sedangkan plafond KUR Mikro maksimal Rp 25.000.000 dengan tingkat suku bunga efektif 7% per tahun atau ditetapkan oleh Mentri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan.

Keputusan untuk memberikan pinjaman berupa KUR diputuskan oleh bank pelaksana sesuai dengan kelayakan usaha dengan asas-asas perkreditan yang sehat dan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maksud dari adanya program ini adalah memberdayakan UKM sebagai salah satu sektor usaha yang mampu berperan saebagai pencipta lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan agar mendapatkan kemudahan mengakses pembiayaan bagi kemajuan usahanya.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi dalam penelitian ini, selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini, maka dalam bab II ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang terlihat dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, tahun	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Abadi, 2014	Analisis pengaruh karakteristik peminjam, besar pinjaman, jenis usaha, dan lama usaha terhadap tingkat kelancaran pengembalian kredit usaha rakyat (KUR) MIKRO (Studi Kasus pada Debitur KUR Mikro BRI Unit Kendal Kota)	Dependen: karakteristik peminjam, besar pinjaman, jenis usaha, dan lama usaha Independen: tingkat kelancaran pengembalian kredit	Secara simultan kelancaran pengembalian pinjaman dipengaruhi karakteristik peminjam, besar pinjaman, jenis usaha, dan lama usaha. Secara parsial Besar Pinjaman dan Lama Usaha memiliki pengaruh terhadap tingkat kelancaran pengembalian KUR Mikro pada BRI Unit Kendal Kota.
2	Pradita, 2013	Analisis karakteristik debitur yang mempengaruhi tingkat pengembalian kredit guna menanggulangi terjadinya *Non Performing Loan* (NPL) (Studi kasus pada BRI Kantor Cabang Pembantu Sukun Malang)	Dependen: *celebrity endorese*, *brand image*, *brand loyality* dan *perceived quality* Independen: Minat beli konsumen dan intensi rekomendasi	Secara parsial tingkat pendidikan, jumlah kredit, dan laba usaha berpengaruh kuat terhadap terjadinya kredit macet.

Berlanjut ke hal 35…

…Lanjutan Tabel 2.1

No	Peneliti, tahun	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
3.	Kaswati, 2018	Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian pembiayaan mudharabah	Dependen: Tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, omzet usaha dan lama usaha Independen: tingkat kelancaran pengembalian kredit	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, omzet usaha dan lama usaha berpengaruh secara positif signifikan terhadap tingkat pengembalian pembiayaan mudharabah baik secara parsial maupun simultan.
4.	Kusumaningtyas, 2017	Pengaruh karakteristik personal, karakteristik usaha, karakteristik kredit, dan jaminan terhadap tingkat pengembalian kredit di BPR Nusamba Adiwerna Kabupaten Tegal tahun 2016	Dependen: karakteristik personal, karakteristik usaha, karakteristik kredit, dan jaminan Independen: tingkat pengembalian kredit	Karakteristik personal, karakteristik usaha, karakteristik kredit, dan jaminan secara positif signifikan terhadap tingkat pengembalian kredit di BPR
5.	Khaerunnisa dan Suryani, 2016	Pengaruh karakter individu, usaha dan agunan terhadap tingkat pengmbalian kredit pada PT. Bank Mandiri (Persero) TBK. KCM Puri Nirwana	Dependen: Pengaruh karakter individu, usaha dan agunan Independen: tingkat pengembalian kredit	Pengaruh karakter individu, usaha dan agunan mempengaruhi tingkat pengembalian Kredit Usaha Mikr

Sumber: Jurnal Online

2.2 Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori, maka dapat digambarkan kerangka konseptual adalah sebagai berukut:

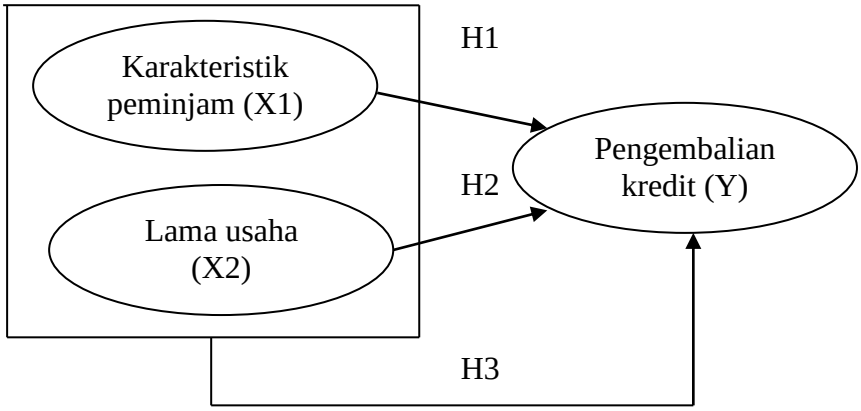

Sumber: Abadi, 2014

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

2.3 Hipotesis

Dari kerangka konseptual yang penulis buat maka hipotesis sementara dari penelitian ini adalah:

H1 : Diduga karakteristik peminjam secara parsial berpengaruh terhadap tingkat pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Pada Bank BRI Cabang Pasir Pengaraian.

H2 : Diduga lama usaha secara parsial berpengaruh terhadap tingkat pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Pada Bank BRI Cabang Pasir Pengaraian.

H3 : Diduga karakteristik peminjam dan lama usaha secara simultan berpengaruh terhadap tingkat pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Pada Bank BRI Cabang Pasir Pengaraian.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.8 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017:59) yaitu metode untuk menguji teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antara variabel yang diukur sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur-prosedur statistik. Penelitian ini memiliki dua jenis variabel yaitu variabel independen terdiri dari karakteristik peminjam dan lama usaha serta variabel dependen (tingkat pengembalian kredit). Lokasi penelitian ini dilakukan pada UMKM di Kecamatan Rambah yang menjadi nasabah KUR pada Bank BRI Cabang Pasir Pengarain. Waktu penelitian pada bulan Maret sampai dengan Desember 2022.

3.9 Populasi Dan Sampel

Menurut Sugiyono (2016:21), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini populasi penelitian adalah UMKM di Kecamatan Rambah yang menjadi nasabah KUR pada Bank BRI Cabang Pasir Pengarain.

Sampel adalah suatu himpunan bagian (subset) dari unit populasi yang diharapkan dapat mewakili populasi penelitian. Agar informasi yang diperoleh dari sampel benar-benar mewakili populasi, sampel tersebut harus mewakili karakteristik populasi yang diwakilinya. Alasan menggunakan Quota sampling

dalam penelitian ini dikarenakan sampel yang ditetapkan hanya sekedar perkiraan akan relatif memadai untuk mendapatkan data yang diperlukan yang diperkirakan dapat mencerminkan populasinya tidak dapat diperhitungkan secara tegas proporsinya dari populasi, karena jumlah anggota populasi tidak diketahui secara pasti. Untuk memperoleh sampel yang dapat mewakili karakteristik populasi, diperlukan metode pemilihan sampel yang tepat. Informasi dari sampel yang baik akan dapat mencerminkan informasi dari populasi secara keseluruhan (Kuncoro, 2017: 103).

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *quota sampling*, yakni tehnik penentuan sampel dengan cara menetapkan jumlah tertentu sebagai target yang harus dipenuhi dalam pengambilan sampel dari populasi (khususnya yang tidak terhingga atau tidak jelas), kemudian dengan patokan jumlah tersebut peneliti mengambil sampel secara sembarang asal memenuhi persyaratan sebagai sampel dari populasi tersebut (Kasiram, 2017:227). *Quota sampling* termasuk dalam metode *nonprobability sampling* (Sugiyono, 2016:25). Adapun jumlah sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebanyak 34 UMKM dengan kriteria yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu:

1. Sampel adalah UMKM di Kecamatan Rambah.
2. Sampel adalah UMKM di Kecamatan Rambah yang merupakan nasabah KUR Mikro Bank BRI Cabang Pasir Pengaraian.
3. Minimal sudah menjadi nasabah KUR Mikro Bank BRI Cabang Pasir Pengaraian selama 4 bulan.

3.10 Jenis Dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

1. Data Kuantitatif

   Data kuantitatif adalah data yang diperoleh dari perusahaan berupa data yang dapat dihitung berbentuk angka yang diperoleh dari dokumen atau laporan-laporan.

2. Data Kualitatif

   Data kualitatif adalah data yang menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa pendapat dari responden terhadap pertanyaan dalam bentuk kuesioner.

3.3.2. Sumber Data

1. Data Primer

   Data primer merupakan suatu data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti sendiri. Data primer dari penelitian ini yaitu responden yang memberikan tanggapan dalam kuesioner mengenai variabel-variabel dalam penelitian.

2. Data Sekunder

   Data sekunder adalah data yang diolah oleh orang lain dan telah dipublikasikan. Data tersebut diperoleh dari buku, laporan instansi terkait maupun dari literatur-literatur yang ada.

3.11 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data merupakan suatu usaha untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Hal ini sangat penting karena pengujian hipotesis dilakukan berdasarkan data tersedia. Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, maka teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian adaah sebagai berikut:

1. Observasi

   Tehnik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang dihadapi.

2. Kuesioner

   Yaitu memperoleh informasi dengan memberikan daftar pertanyaan atau angket yang akan diajukan kepada pihak yang berkepentingan.

3 Dokumentasi

   Adalah tehnik untuk mengumpulkan data dari sumber seperti dokumen, buku-buku, majalah, notulen rapat, catatan harian dan rekaman.

4. Wawancara

   Adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang terhadap suatau objek penelitian untuk menggali informasi yang diinginkan dengan cara melakukan tanya jawab, baik terstruktur maupun tidak terstruktur, langsung maupun tidak langsung.

3.12Defenisi Operasional

Dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependennya. Untuk lebih jelasnya mengenai defenisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Depenisi Operasional Penelitian

Variabel Konsep	Defenisi	Indikator	Jenis Pengukuran
Karakteristik peminjam (X1)	penerima hutang yang diperoleh dari pemberi hutang yang pembayarannya ditentukan oleh jangka waktu pengembalian yang sudah disepakati sebelumnya	Sudrajat (2018:30-37) 1. Jumlah tanggungan keluarga 2. Jumlah pinjaman 3. Jangka waktu pengembalian pinjaman	Ordinal
Lama usaha (X2)	lama waktu yang sudah dijalani pedagang dalam menjalankan usahanya.	Danang (2017) 1. Lama usaha pedagang dinyatakan dalam satuan tahun 2. Keterampilan usaha 3. Pengalaman usaha 4. Pengetahuan usaha	Ordinal
Pengembalian kredit (Y)	Kemampuan peminjam dalam membayar atau melunasi hutang kepada pihak peminjam sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati beserta besarnya bunga yang telah ditetapkan.	Thomas dkk (2018:12) 1. Jumlah pinjaman 2. Tingkat bunga pinjaman 3. Skedul Pembayaran 4. Besarnya angsuran	Ordinal

Sumber: Jurnal online

3.6 Instrumen Penelitian

Menurut Arikunto (2017:121), instrumen adalah alat pada waktu peneliti menggunakan sesuatu metode. Menurut Arikunto (2017:101), "Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya." Instrumen diperlukan agar pekerjaan yang dilakukan lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga data lebih mudah diolah. Instrumen atau alat yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner. Kuesioner digunakan untuk menyelidiki pendapat subjek mengenai suatu hal atau untuk mengungkapkan kepada responden.

Menurut Arikunto (2017:128), "Angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan atau peryataan yang digunakan untuk memperoleh informasi sampel dalam arti laporan pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui." Dalam penelitian ini peneliti menggunakan instrument penelitian dalam bentuk Kuisioner dengan menggunakan skala likert. Skala likert menurut Sugiyono (2016:86) yaitu di gunakan untuk mengukur sikap, persepsi pendapat seseorang terhadap suatu gejala atau kejadian sosial. Dalam kuisioner ini di gunakan sklala likert yang terdiri dari sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Skala likert adalah skala yang di rancangkan untuk memungkinkan responden menjawab berbagai tingkatan setiap objek yang akan di ukur. Jawaban dari kuisioner tersebut di beri bobot skor atau nilai sebagai berikut:

Tabel 3.2
Penilaian Skor Terhadap Jawaban Kuesioner

Pilihan Jawaban	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Ragu-Ragu	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Sugiyono (2016:87).

Instrumen dalam penelitian ini di uji dengan uji instrumen terdiri dari:

3.12.1 Uji validitas

Uji validitas yang digunakan untuk mengukur sah atau tidak validnya kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dengan mengukur validitas yang dilakukan dengan mengkolerasikan skor butir pertanyaan dengan total skor variabel. Untuk mengetahui skor masing-masing item pertanyaan valid atau tidaknya, maka ditetapkan criteria statistik sebagai berikut:

Jika r hitung >r tabel dan nilai positif, maka variabel tersebut valid.

Jika r hitung <r tabel, maka variabel tersebut tidak valid.

3.12.2 Uji reliabilitas

Uji reliabilitas ialah alat yang digunakan untuk mengukur kuesioner yang mempunyai indikator dari variabel. Jika kuesioner dinyatakan reliabel atau handal maka jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah stabil atau konsisten dari waktu kewaktu.

Uji reliabilitasdilakukan menggunakan bantuan program SPSS, yang akan memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan menguji statistic Cronbach Alpha (α) suatu variabel dikatakan reabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 6,0.

3.7 Tehnik Analisis Data

3.7.1 Analisis Deskriptif

Dalam menganalisis data deskriptif dan kuantitatif mengunakan skala pengukuran yang memakai skala likert dimana setiap jawaban yang tersedia diberi bobot nilai yang selanjutnya dilakukan perhitungan skor rata-rata dengan rumus:

$$TCR=\frac{\text{SkorRata}-\text{Rata}}{\text{Skor Maksimal}}x100\%$$

Menurut Martoyo (2018:93), untuk mengetahui Tingkat Capaian Responden, peneliti menggunakan metode *Ranking Method* yang dikemukakan oleh yaitu suatu metode penelitian dengan cara menyusun orang yang dinilai berdasar kan tingkatannya pada beberapa sifat yang dinilai, dalam hal ini dibuat sebuah *Master Scale* yaitu suatu skala pengukuran yang pada umumnya menunjukkan lima tingkatan suatu sifat tertentu, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.3
Skor pilihan jawaban responden

Tingkat Capaian Responden (%)	Kriteria
81- 100	Sangat baik
71- 80,99	Baik
61- 70,99	Cukup baik
51- 60,99	Kurang baik
0- 50,99	Tidak Baik

Sumber :Martoyo, 2018

Setelah dilakukan tabulasi terhadap hasil perhitungkan masing- masing variabel pada kuesioner yang disebarkan kepada responden maka data-data tersebut dimasukkan atau diproses kedalam program SPSS for windos versi 18.00 dan melihat pengaruh bebas terhadap variabel terikat dan pengaruh masing-masing variabel.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Kemudian untuk dapat mengetahui bahwa model regresi yang diolah adalah sah (tidak terdapat penyimpangan), maka data tersebut akan diuji melalui uji asumsi klasik sebagai berikut :

1. Uji Normalitas

Sugiyono (2016:32) uji normatis bertujuan untuk menguji apakah distribusi data variabel terikat dan variabel bebas dalam model regresi yang terjadi secara normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan statistik *Kolgomorov-Smirnov* dengan SPSS 18. Kriteria yang digunakan adalah membandingkan nilai *Asymp. Sig(2-Tailed)* dengan nilai alpha 5% sehingga apabila nilai *Asymp. Sig(2-Tailed)* > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berasal dari populasi yang terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolonieritas dapat bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antara beberapa variabel atau semua variabel bebas. Untuk dapat melakukan uji multikolonieritas dalam model regresi penelitian yang dilakukan akan dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflantion factor* (VIF). Yang dimaksud dengan *Tolerance* ialah mengukur variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF =1/*tolerance*) serta menunjukkan multikolonieritas yang tinggi. Nilai yang umum digunakan adalah nilai *tolerance* diatas 0,10 atau sama dengan nilai VIF dibawah 10 menunjukkan tidak terjadi multikolonieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas di gunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidak samaan varians residul dari satu pengamatan yang lain. Jika varians dari residul dari suatau pengamatan ke pengamatan yang lain tidak tetap, maka di sebut heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya heterokedatisitas dengan melakukan uji scatterplot.

3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Persamaan regresi untuk tiga prediktor adalah dikutip dari teori (Sugiyono, 2016:284):

$$Y=a + b1X1 + b2X2$$

Dimana :
- Y = Pengembalian pinjaman
- X1 = Karakteristik peminjam
- X2 = Lama usaha
- B1, 2 = Koefisien Regresi

3.7.4 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan (X) menerangkan variasi variabel dependen (Y) yaitu. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1). Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen (bebas) dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3.7.5 Uji Hipotesis

3.7.5.1 Uji t

Pengujian pasial ini menggunakan t- test dilakukan untuk menguji pengaruh semua variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Uji t ini dengan membandingkan t hitung dengan t tabel dengan menentukan signifikansi tingkat kepercayaan (α) sebesar 0,05 (5%) maka kriteria untuk menentukan diterima atau ditolaknya hipotesis adalah sebagai berikut:

Terima Ho apabila

t (χ/2 : df) < t <t (χ/2 : df)

Tolak Ho apabila

t (χ/2 : df) > t > t (χ/2 : df)

Ketentuan :

Ho diterima jika : $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau signifikan > 0,05

Ho ditolak jika : $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau signivikan < 0,05

Adapun uji hipotesis dapat dirumuskan dalam bentuk nol atau penolakan dengan hipotesis alternatif atau penerimaan.

H_a : diterima bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai sig ≤ Level signifikan (5%) artinya ada pengaruh yang signifikan karakteristik peminjam dan lama usaha secara parsial terhadap tingkat pengembalian kredit UMKM di Kecamatan Rambah.

Ho : diterima bila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau nilai sig ≥ Level signifikan (5%) artinya tidak ada pengaruh yang signifikan signifikan karakteristik

peminjam dan lama usaha secara parsial terhadap tingkat pengembalian kredit UMKM di Kecamatan Rambah.

3.7.5.2 Uji F

Uji F bertujuan untuk melihat apakah varia bel X berpengaruh Signifikan terhadap Y. Apakah $F_{hitung}<F_{tabel}$ dan H_0 ditolak, tapi jika $F_{hitung}>F_{tabel}$ maka H_0 ditolak H_a diterima yang berarti bahwa secara bersama-sama x_1, x_2 dan x_3 berpengaruh terhadap Y.

Ho diterima jika : F_{hitung} < dari F_{tabel} atau signifikan 0,05

Ha diterima jika : F_{hitung} > F_{tabel} atau signifikan 0,05

Kriteria pengujian yang digunakan yaitu:

H_aDiterima : Apabila F hitung > F tabel, artinya variabel signifikan karakteristik peminjam dan lama usaha secara simultan terhadap tingkat pengembalian kredit UMKM di Kecamatan Ramba.

H_oDiterima : Apabila F hitung < F tabel, artinya variabel signifikan karakteristik peminjam dan lama usaha tidak berpengaruh secara simultan terhadap tingkat pengembalian kredit UMKM di Kecamatan Rambah.